



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 739 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi serta dampak positif terhadap hasil pembangunan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023.

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebagai panduan dalam melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. instrumen evaluasi eksternal oleh Evaluator Nasional, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi reformasi birokrasi;
 - b. materi/substansi pelaporan evaluasi eksternal oleh Evaluator Meso, yang digunakan oleh evaluator meso dalam melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya;
 - c. dokumen kelengkapan evaluasi internal, yang digunakan oleh Evaluator Internal dalam mendukung evaluasi internal reformasi birokrasi di instansinya; dan
 - d. penetapan tema dan fokus Reformasi Birokrasi Tematik Tematik tahun 2023.
- KETIGA** : Instrumen evaluasi eksternal oleh Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yang memuat:
- a. Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Kriteria Penilaian Rencana Aksi RB General dan RB Tematik;
 - c. Definisi Operasional Indikator Keberhasilan Evaluasi RB Tahun 2023; dan
 - d. Kriteria Penilaian RB Tematik.
- KEEMPAT** : Materi/substansi pelaporan evaluasi eksternal oleh Evaluator Meso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Dokumen kelengkapan evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Menetapkan 4 (empat) tema dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Realisasi Investasi;
 - c. Digitalisasi Pemerintahan; dan
 - d. Prioritas Aktual Presiden
- KETUJUH : Tema Digitalisasi Pemerintahan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH huruf c berfokus pada penanganan stunting.
- KEDELAPAN : Tema Prioritas Aktual Presiden sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH huruf d berfokus pada Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 739 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2023

INSTRUMEN EVALUASI EKSTERNAL OLEH EVALUATOR NASIONAL

- I. Lembar Kerja Evaluasi (Reformasi Birokrasi) RB Tahun 2023
a. Lembar Kerja Evaluasi RB Kementerian/Lembaga

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB General				100,00		
	A.	Strategi Pelaksanaan RB General		10,00		
		1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			40,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)			33,00		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			33,00		
	1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi.
	3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0-100	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata rata tiga tahun terakhir pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SPBE)	2,00	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres.
	8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan anggaran pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Keuangan) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan aset pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Keuangan) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	0-100	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		12. Indeks Kualitas Kebijakan	2,00	0-100	Mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi Negara) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		13. Indeks Reformasi Hukum	2,00	0-100	Mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		15. Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			7,00		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			7,00		
		1. Indeks Sistem Merit	4,00	0-400	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara)

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00		Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	
	b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	
C. Capaian Sasaran Strategis RB			50,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)			28,00		
	1.	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SPBE)	9,00	1-5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		a.	Capaian Prioritas Nasional	2,00	0-100	Menghitung capaian terhadap target indikator Prioritas Nasional (PN) dengan menghitung perbandingan antara jumlah indikator PN yang sesuai dan/atau melebihi target yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga terkait dengan total indikator PN yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga terkait. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
		b.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8,00	0-100	Menghitung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan pada kementerian/lembaga dengan membandingkan jumlah IKU yang melebihi target dan sesuai target dengan total IKU. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
		3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut	Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas kementerian/lembaga dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Opini BPK, dan 2) Tindak Lanjut Rekomendasi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		a.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				22,00		

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0-100	Mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.
	2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0-100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada kementerian/lembaga. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.
	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN			100,00		
KOEFISIEN					Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.
TOTAL RB GENERAL					

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB Tematik			10,00		
A.	Capaian RB Tematik				
	1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100	Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada kementerian/lembaga dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik
	2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100	
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden			
	a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100	
	b.	Pengendalian Inflasi	2,00	0-100	
TOTAL RB TEMATIK			10,00		
TOTAL NILAI RB			110,00		

Keterangan: Dalam hal instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai lokus evaluasi K/L Meso, maka penilaian RB General tidak mengikutsertakan indikator terkait

b. Lembar Kerja Evaluasi RB Pemerintah Provinsi

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB General				100,00		
A.	Strategi Pelaksanaan RB General			10,00		
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General		3,00	0-100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		7,00	0-100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			40,00		
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)			33,00		
	KEBIJAKAN PERCEPATAN			33,00		
	1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		2,00	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
		2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi.
		3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3,00	0-100	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,50	0-100	Mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,00	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres.
	8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,50	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	9.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,50	0-100	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	10.	Indeks Kualitas Kebijakan	2,00	0-100	Mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					Negara) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		11. Indeks Reformasi Hukum	2,00	0-100	Mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		12. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		13. Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,50	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		SOFT ELEMENT (Sasaran 2)	7,00		
		KEBIJAKAN PERCEPATAN	7,00		
		1. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)	4,00	0-400	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00		Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	
	b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	
C. Capaian Sasaran Strategis RB			50,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)			28,00		
	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	1-5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		
	a.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Makro	2,00	0-100	Capaian IKU Makro diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah indikator makro yang telah mencapai dan/atau melebihi target dengan jumlah indikator kinerja makro pemerintah provinsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
			b. Capaian IKU Non Makro	8,00	0-100	Capaian IKU Non Makro diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah IKU Non Makro yang telah mencapai dan/atau melebihi target dengan jumlah IKU Non Makro pemerintah provinsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
		3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut	Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Opini BPK, dan 2) Tindak Lanjut Rekomendasi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		a.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				22,00		
		1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0-100	Mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0-100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.
	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN			100,00		
KOEFISIEN					Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.
TOTAL RB GENERAL					
RB Tematik			20,00		
	A.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5,00		
	1.	Pengentasan Kemiskinan	1,00	0-100	

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Realisasi Investasi	1,00	0-100	Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada Pemerintah Provinsi dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik.
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting	1,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden			
	a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,00	0-100	
	b.	Laju Inflasi	1,00	0-100	
B. Capaian Indikator Dampak RB Tematik			15,00		
	1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan	3,00	0-100	Mengukur capaian dampak dari pembangunan RB Tematik yang telah dilakukan pada empat tema yang telah ditetapkan
	2.	Peningkatan Realisasi Investasi	3,00	0-100	
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	3,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden:			
	a.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	3,00	0-100	
	b.	Tingkat Inflasi	3,00	0-100	
TOTAL RB TEMATIK			20,00		

Penilaian	Bobot	Range Nilai	Penjelasan
TOTAL NILAI RB	120,00		

Keterangan: Dalam hal instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai lokus evaluasi K/L Meso, maka penilaian RB General tidak mengikutsertakan indikator terkait

c. Lembar Kerja Evaluasi RB Pemerintah Kabupaten/Kota

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB General			100,00		
A. Strategi Pelaksanaan RB General			10,00		
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			40,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)			33,00		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			33,00		
	1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi.
	3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zone Integritas (ZI)	3,50	0-100	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata rata tiga tahun terakhir pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	6.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres.
	7.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,50	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	8.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,50	0-100	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	9.	Indeks Kualitas Kebijakan	2,50	0-100	Mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi Negara) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	10.	Indeks Reformasi Hukum	2,50	0-100	Mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,50	1-5	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,50	0-100	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			7,00		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			7,00		
	1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-400	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00		Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	dan Ombudsman RI) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	
	C.	Capaian Sasaran Strategis RB		50,00		
		HARD ELEMENT (Sasaran 1)		28,00		
		1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	1-5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.
		2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		
		a.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Makro	2,00	0-100	Capaian IKU Makro diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah indikator makro yang telah mencapai dan/atau melebihi target dengan jumlah indikator kinerja makro pemerintah kabupaten/kota. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		b.	Capaian IKU Non Makro	8,00	0-100	Capaian IKU Non Makro diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah IKU Non Makro yang telah mencapai dan/atau melebihi target dengan jumlah IKU Non Makro pemerintah kabupaten/kota. Penilaian dilakukan oleh evaluator nasional.
	3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan		9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut	Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Opini BPK, dan 2) Tindak Lanjut Rekomendasi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		a.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				22,00		
	1.	Indeks BerAKHLAK		4,00	0-100	Mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0-100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.
	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN			100,00		
KOEFISIEN					Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.
TOTAL RB GENERAL					
RB Tematik			20,00		
	A.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5,00		
	1.	Pengentasan Kemiskinan	1,00		

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
	2.	Realisasi Investasi	1,00	0-100	Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik.
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	1,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden			
	a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,00	0-100	
	b.	Pengendalian Inflasi	1,00	0-100	
B. Capaian Indikator Dampak RB Tematik			15,00		
	1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan	3,00	0-100	Mengukur capaian dampak dari pembangunan RB Tematik yang telah dilakukan pada empat tema yang telah ditetapkan
	2.	Peningkatan Realisasi Investasi	3,00	0-100	
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting	3,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden:			
	a.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	3,00	0-100	
	b.	Tingkat Inflasi	3,00	0-100	
TOTAL RB TEMATIK			20,00		
TOTAL NILAI RB			120,00		

Keterangan: Dalam hal instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai lokus evaluasi K/L Meso, maka penilaian RB General tidak mengikutsertakan indikator terkait

II. Kriteria Penilaian Rencana Aksi RB General

Kriteria		Penjelasan
A.	Penilaian Kegiatan Utama <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	
1.	Penetapan Kegiatan Utama	Seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam <i>Road Map</i> RB Nasional telah ditetapkan pada <i>Road Map</i> RB kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
2.	Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama	Seluruh indikator kegiatan utama yang ditetapkan telah dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja.
3.	Keabsahan Rencana Aksi	Telah terdapat pernyataan keabsahan atas rencana aksi yang ditetapkan.
B.	Kriteria Penilaian Penetapan Rencana Aksi	
1.	Kelogisan Rencana Aksi	Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi dengan kebutuhan. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi <i>baseline</i> /eksisting yang direpresentasikan melalui indikator <i>immediate outcome</i> .
2.	Relevansi dan Kecukupan Indikator <i>Output</i>	Penetapan indikator <i>output</i> pada setiap aksi perlu memenuhi kriteria relevansi dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
3.	Ketepatan Penetapan Target Indikator <i>Output</i>	Ketepatan penetapan target pada setiap indikator <i>output</i> mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
4.	Anggaran	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan.

III. Definisi Operasional Indikator Keberhasilan Evaluasi RB Tahun 2023

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
1	Indeks BerAKHLAK	Kementerian PANRB c.q. SDMA	Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core values</i> ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.	0 - 100% (A - D)	75% - 100% (A) = Sehat 50% - 74,9% (B) = Cukup Sehat 25% - 49,9% (C) = Tidak Sehat 0 - 24,9% (D) = Sangat Tidak Sehat	Nilai Indeks BerAKHLAK B
2	Nilai <i>Employer Branding</i> ASN	Kementerian PANRB c.q. SDMA	Indikator yang mengukur tingkat ketertarikan masyarakat (Non-ASN) untuk bergabung menjadi ASN. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada masyarakat dengan kualifikasi tertentu (Mahasiswa, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Pegawai Swasta, Diaspora Mahasiswa, dan Diaspora Profesional).	-100 - 100	70 - 100 = <i>Excellent</i> 30 - 70 = <i>Great</i> 0 - 30 = <i>Good</i> -100 - 0 = <i>Needs Improvement</i>	Nilai <i>Employer Branding</i> "Good"

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
3	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Badan Pusat Statistik	<p>Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.</p> <p>Pengukuran dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi penilaian mandiri K/L/D untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.</p> <p>Pengukuran dilakukan dengan tujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.</p>	1 - 5	<p>5: Optimum (4,2 s.d. 5,0 = Memuaskan)</p> <p>4: Terpadu (3,5 s.d. < 4,2 = Sangat Baik)</p> <p>3: Terdefinisi (2,6 s.d. < 3,5 = Baik)</p> <p>2: Terkelola (1,8 s.d. < 2,6 = Cukup)</p> <p>1: Rintisan (< 1,8 = Kurang)</p>	Nilai IPS 2,6 s.d. < 3,5

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
4	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Kementerian/ Lembaga)	Kementerian PANRB c.q. Balaks	Persentase PSO merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan. Penghitungan persentase PSO dilakukan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah.	0 - 100%	-	Nilai di atas 80%
5	Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah a. Penyederhanaan birokrasi	Kementerian Dalam Negeri	Capaian penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah merupakan tingkat ketaatan daerah dalam melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan pelantikan.	0 – 100%	Kategori 1: Melaksanakan penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan dan melakukan pelantikan 100% Kategori 2: Melaksanakan	Kategori 1

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
	b. Persentase Capaian Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah		Persentase capaian penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah merupakan perbandingan antara jumlah struktur jabatan administrasi yang disederhanakan dengan target struktur jabatan administrasi yang seharusnya disederhanakan sesuai dengan model penyederhanaan struktur organisasi.	0 – 100%	<p>penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan, tetapi melakukan pelantikan kurang dari 100%</p> <p>Kategori 3: Melaksanakan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan tetapi tidak melakukan pelantikan</p> <p>Kategori 4: Daerah yang tidak sama sekali melaksanakan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan</p> <p>Kategori 1: Melaksanakan penyederhanaan struktur lebih besar sama dengan 100%</p> <p>Kategori 2: Melaksanakan penyederhanaan struktur</p>	Kategori 1 "Sangat Baik" dan Kategori 2 "Baik"

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					kurang dari 100%, namun lebih besar sama dengan 50% Kategori 3: Melaksanakan penyederhanaan struktur kurang dari 50% namun lebih besar dari 0% Kategori 4: Tidak melaksanakan penyederhanaan struktur	
6	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Kementerian PANRB c.q. Balaks	Penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan PSO.	0 - 5	I - VI	Nilai di atas 4

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<p>Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi Sistem Pengadaan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); b. <i>E-Tendering</i> (Tender/Seleksi/Tender Cepat); c. <i>E-Purchasing</i>; d. <i>Non-E-Tendering</i> & <i>Non-E-Purchasing</i>; dan e. E-Kontrak. 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ). 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 	0 - 100	<p>100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang</p>	<p>Nilai ITKP dengan kategori Baik</p>

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kementerian Keuangan	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	0 - 100	IKPA \geq 95 = Sangat Baik 89 \leq IKPA < 95 = Baik 70 \leq IKPA < 89 = Cukup IKPA < 70 = Kurang	89 \leq IKPA < 95
9	Tingkat Maturitas SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Level 1 (skor 1,00) - Level 5 (skor \geq 4,50)	Level 1 = Rintisan (skor 1,00 - 1,99) Level 2 = Berkembang (skor 2,00 - 2,99) Level 3 = Terdefinisi (skor 3,00 - 3,99) Level 4 = Terkelola dan Terukur (skor 4,00 - 4,49) Level 5 = Optimum (skor 4,50 dst.)	Level 3 / Terdefinisi

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
10	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN / Bappenas	<p>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi.</p> <p>Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh K/L/D dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran.</p> <p>Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L/D dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.</p>	0 - 100	91 - 100 = Sangat Baik 81 - 90 = Baik 71 - 80 = Cukup Baik 61 - 70 = Kurang < 60 = Sangat Kurang	> 81 dan < 91

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
11	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Kementerian PANRB c.q. Balaks dan Kementerian/Lembaga teknis terkait	adalah tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK.	0 - 5	(0) Belum memiliki arsitektur (1) sudah memiliki arsitektur <i>as-is</i> (2) memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur <i>to-be</i> (3) memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan <i>gap analysis</i> serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (<i>as-is</i> , <i>to-be</i> , dan <i>gap analysis</i> -nya) (4) memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)	Telah memiliki arsitektur <i>as-is</i> , <i>to-be</i> , dan peta rencana SPBE (Nilai tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE = 3)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					(5) memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan	
12	Tingkat Digitalisasi Arsip	Arsip Nasional RI	Instrumen untuk menilai kualitas Kinerja penyelenggaraan kearsipan K/L/D dalam rangka transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip) yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital yang terdiri dari; a. Digitasi b. Implementasi AUBKD/SRIKANDI atau aplikasi sejenis c. Kinerja Simpul JIKN/SIKN d. Ketersediaan sumber daya (Audit TIK, SDM, data center dan <i>helpdesk</i>)	0 - 100	0 - 40 = Sangat Kurang > 40 - 50 = Kurang > 50 - 60 = Cukup > 60 - 70 = Baik > 70 - 80 = Sangat Baik > 80 - 90 = Memuaskan > 90 - 100 = Sangat Memuaskan	> 60 - 70 = Tersedianya kebijakan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip secara elektronik dan menerapkan aplikasi bidang kearsipan sampai dengan pemberkasan arsip secara elektronik dan layanan arsip digital melalui JIKN.

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
13	Indeks Pengelolaan Aset	Kementerian Keuangan	<p>Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan parameter pengukuran kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang secara tahunan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN).</p> <p>Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau IPA disusun untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN yang tercakup dalam siklus pengelolaan BMN mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal. 	1 - 4	<p>Indeks 4 = Sangat Baik Indeks 3 = Baik Indeks 2 = Cukup Indeks 1 = Buruk</p>	Indeks 3

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
14	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kementerian PANRB c.q. Yanlik	Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat diukur melalui indikator: <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola) - Rencana aksi pengelolaan pengaduan - Tindak lanjut penyelesaian pengaduan - Responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut) - Kualitas penyelesaian pengaduan - Rating penilaian masyarakat 	1 - 5	5 (Sangat Baik) = <ol style="list-style-type: none"> (1) Memiliki SK Pengelola, (2) Memiliki Rencana aksi, (3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan, (4) kecepatan tindak lanjut < 3 hari (5) pengaduan ditindaklanjuti secara substantif (6) rata-rata rating penilaian masyarakat >4 4 (Baik) = Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi 3 (Cukup) = Hanya memenuhi 3 dari 6	Mendapatkan nilai minimal 4

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					<p>indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi</p> <p>2 (Kurang Baik) = Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi</p> <p>1 (Sangat Tidak Baik) = Hanya memenuhi maksimal 1 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	<p>Indeks Kualitas Kebijakan yang selanjutnya disingkat IKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.</p> <p>Pengukuran IKK pada proses perencanaan kebijakan dilakukan pada tahap:</p> <p>a. agenda setting kebijakan; dan</p> <p>b. formulasi kebijakan.</p> <p>Pengukuran IKK pada proses evaluasi kemanfaatan dilakukan pada tahap:</p> <p>a. implementasi kebijakan; dan</p> <p>b. evaluasi kebijakan.</p>	0 - 100	91 - 100 = Unggul 80 - 90,99 = Sangat Baik 65 - 79,99 = Baik 50 - 64,99 = Cukup < 50 = Kurang	65 - 79,99 (Baik)
16	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional.	0 - 100	> 90 - 100 (AA / Istimewa) > 80 - 90 (A / Sangat Baik) > 70 - 80 (BB / Baik) > 60 - 70 (B / Cukup Baik) > 50 - 60 (CC / Cukup) > 30 - 50 (C / Buruk) 0 - 30 (D / Sangat Buruk)	> 70 - 80 (BB)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
17	Indeks Sistem Merit	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara	Indikator yang menggambarkan tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah (K/L/D) dengan penilaian yang didasarkan aspek: 1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan karier; 4. Promosi, dan mutasi; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; 8. Sistem informasi.	Skor: 0 - 410 Indeks: 0 - 1	Buruk Skor: 0 - 174 Indeks: 0 - 0,4 Kurang Skor: 175 - 249 Indeks: 0,41 - 0,6 Baik Skor: 250 - 324 Indeks: 0,61 - 0,8 Sangat Baik Skor: 325 - 410 Indeks: 0,81 - 1	Jika Instansi Pemerintah telah memenuhi skor komposit aspek penerapan sistem merit \geq 250

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
18	Indeks Pelayanan Publik	Kementerian PANRB c.q. Yanlik	<p>IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional.</p> <p>Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%) <p>Adapun penilaian dilakukan melalui 3 formulir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir 01 : Pengisian Bukti dukung (Bobot 0%) - Formulir 02: Penilaian Ahli (Bobot 75%) - Formulir 03: Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan (Bobot 25%) 	0 - 5	<p>4,51 - 5,00 (A) = Pelayanan Prima</p> <p>4,01 - 4,50 (A-) = Sangat Baik</p> <p>3,51 - 4,00 (B) = Baik</p> <p>3,01 - 3,50 (B-) = Baik dengan Catatan</p> <p>2,51 - 3,00 (C) = Cukup</p> <p>2,01 - 2,50 (C-) = Cukup dengan Catatan</p> <p>1,51 - 2,00 (D) = Prioritas Pembinaan</p> <p>1,01 - 1,50 (E) = Prioritas Pembinaan</p> <p>0 - 1,00 (F) = Prioritas Pembinaan</p>	≥ 3,51

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
19	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	<p>Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Pelaksana 2. Sarana Prasarana 3. Standar Pelayanan 4. Persepsi Maladministrasi 5. Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik mengukur penyelenggara 	0 - 100	<p>88,00 - 100 (A) = Zona Hijau Kualitas Tertinggi 78,00 - 87,99 (B) = Zona Hijau Kualitas Tinggi 54,00 - 77,99 (C) = Zona Kuning Kualitas Sedang 32,00 - 53,99 (D) = Zona Merah Kualitas Rendah 0 - 31,99 (E) = Zona Merah Kualitas Terendah</p>	78,00 - 87,99 Kategori B Zona Hijau Kualitas Tinggi

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
20	Indeks SPBE	Kementerian PANRB c.q. Balaks	<p>- Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat)</p> <p>Domain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE <p>Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator. b) Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Perencanaan Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; 2. Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; 3. Aspek Penyelenggara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator. c) Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Penerapan Manajemen, 	0 - 5	<p>Ukuran Tingkat Kematangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu); b) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua); c) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga); d) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan e) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). <p>Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE</p> <p>Nilai indeks:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan 	<p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). 4,2 – 5,0 Memuaskan b). 3,5 – < 4,2 Sangat Baik c). 2,6 – < 3,5 Baik d). 1,8 – < 2,6 Cukup e). < 1,8 Kurang

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			<p>memiliki turunan 8 (delapan) Indikator;</p> <p>2. Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator.</p> <p>d) Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu:</p> <p>1. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator;</p> <p>2. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator.</p>		<p>perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.</p> <p>b) Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.</p> <p>c) Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan,</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					<p>dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.</p> <p>Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00%</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
21	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Opini BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	<p>Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektivitas sistem pengendalian intern 		<p>Opini BPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Tidak Wajar (TW) - Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
22	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Tindak lanjut tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.</p>		<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi - tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi - rekomendasi belum ditindaklanjuti - rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti 	<p>tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (minimal penyelesaian 75%)</p>

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
23	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	Komponen Penilaian: 1. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas 2. Integritas Instansi 3. Pengelolaan Anggaran 4. Pengelolaan PBJ 5. Pengelolaan SDM 6. Perdagangan Pengaruh (<i>Trading in Influence</i>) 7. Sosialisasi Antikorupsi 8. Transparansi 9. Upaya Pencegahan Korupsi	0 - 100	Sangat Rentan <67.9 Rentan 68-73.6 Waspada 73.7 - 77.4 TerJAGA 77.5 - 100	TerJAGA
24	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kementerian PANRB c.q. Yanlik	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Nilai Interval 1 - 4 (Nilai Interval Konversi 0 - 100)	1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik	Nilai SKM B

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
25	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian PANRB c.q. Deputi RBKunwas	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dalam rata-rata tiga tahun terakhir. Baik unit kerja predikat WBK maupun WBBM	Kementerian /Lembaga (0-3) Pemerintah Daerah (0-3,5)	Kementerian/Lembaga: (>75%) = 3 (>40%-75%) = 2 (>10%-40%) = 1 (0,1%-10%) = 0,75 0% = 0,5 Tidak Mengusulkan = 0 Pemerintah Daerah: (>75%) = 3,5 (>40%-75%) = 2,5 (>10%-40%) = 1,5 (0,1%-10%) = 0,75 0% = 0,5 Tidak Mengusulkan = 0	Kementerian/ Lembaga: 2 Pemerintah Daerah: 2,5

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
26	Nilai SAKIP	Kementerian PANRB c.q. RBKUNWAS	Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: a. perencanaan kinerja (30%) b. pengukuran kinerja (30%) c. pelaporan kinerja (15%) d. evaluasi AKIP internal (25%)	0 - 100	> 90 - 100 (AA) = Sangat Memuaskan > 80 - 90 (A) = Memuaskan > 70 - 80 (BB) = Sangat Baik > 60 - 70 (B) = Baik > 50 - 60 (CC) = Cukup (Memadai) > 30 - 50 (C) = Kurang 0 - 30 (D) = Sangat Kurang	> 60 - 70
27	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian Prioritas Nasional	Kementerian PPN/Bappenas	Capaian Prioritas Nasional diukur menggunakan kinerja efektivitas <i>output</i> kementerian/lembaga dengan membandingkan capaian dan target RO kementerian/lembaga yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Rata-rata kinerja secara keseluruhan dihitung dengan metode rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai bobot).	0 - 100%	> 90% = Baik 60% - 90% = Cukup < 60% = Kurang	> 90 %

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
28	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Kementerian/ Lembaga		<p>Pengukuran Kinerja K/L mencakup 2 (dua) lingkup utama, yaitu Kinerja Efektivitas Output K/L dan Kinerja Efektivitas IKU K/L yang mendukung prioritas pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut.</p> <p>1. Kinerja Efektivitas Output K/L (Pendukung Prioritas Pembangunan) Kinerja efektivitas output K/L diukur dengan membandingkan capaian dengan target RO K/L yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Rata-rata kinerja secara keseluruhan dihitung dengan metode rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai bobot).</p> <p>2. Kinerja Efektivitas IKU K/L (Pendukung Prioritas Pembangunan) Kinerja efektivitas IKU K/L bersumber dari kinerja IKSS/IKP/IKK K/L yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dibandingkan terhadap target kinerja tahunan K/L yang tertuang dalam Renja K/L serta kinerja lima tahunan K/L yang tertuang dalam Renstra K/L.</p>	0-100%	<ul style="list-style-type: none"> • >90% = Baik • 60-90% = Cukup • <60% = Kurang 	"Baik"

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
29	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Makro		Capaian IKU Makro diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah indikator makro yang telah mencapai dan/atau melebihi target dengan jumlah indikator kinerja makro pemerintah kabupaten/kota.	0-100%		
30	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Non Makro		Capaian IKU Non Makro diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah IKU Non Makro yang telah mencapai dan/atau melebihi target dengan jumlah IKU Non Makro pemerintah kabupaten/kota.	0-100%		

IV. Kriteria Penilaian RB Tematik

1. Kementerian/Lembaga

Penilaian RB Tematik pada kementerian/lembaga dilakukan dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi serta capaian indikator dampak RB Tematik. Adapun kriteria penilaian RB Tematik pada kementerian/Lembaga dapat dilihat pada tabel berikut.

Filter	Kriteria	Penjelasan
I	Rencana Aksi	
Input Rencana Aksi RB Tematik pada Portal RB Nasional serta Keabsahan dari Rencana Aksi	a. Kualitas Sasaran Keberhasilan RB	
	Kesesuaian Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila sasaran telah berorientasi hasil/ <i>outcome</i> .
	Kesesuaian Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik.
	Perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup	Dapat diklaim apabila indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran RB Tematik.
	b. Kualitas Rencana Aksi	
	Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah.
	Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	Dapat diklaim apabila rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

Filter	Kriteria	Penjelasan
	Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	Dapat diklaim apabila rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau <i>stakeholder</i> eksternal di luar pemerintahan.
II Capaian Output		
Input Capaian Rencana Aksi pada Portal Reformasi Birokrasi	Capaian Rencana Aksi	Jumlah rencana aksi yang terlaksana dibandingkan dengan rencana aksi yang direncanakan sampai dengan Triwulan III.
III Capaian Dampak		
Memilih tema, input sasaran dan indikator, input rencana aksi, dan input capaian rencana aksi pada Portal RB	Capaian Dampak RB Tematik	<p>Capaian dampak RB Tematik pada tema yang dipilih yang dihitung berdasarkan capaian nasional.</p> <p>a. Pembobotan pada tema Pengentasan Kemiskinan/Realisasi Investasi/Digitalisasi Administrasi Pemerintahan/Pengendalian Inflasi dilakukan dengan memperhitungkan persentase capaian nasional sebagai berikut: $> 100\% = 1,2$ $90\% - 100\% = 1$ $80\% - 90\% = 0,5$ $< 80\% = 0$</p> <p>b. Pembobotan pada tema Penggunaan Produk Dalam Negeri didasarkan pada capaian penggunaan Produk Dalam Negeri.</p>

2. Pemerintah Daerah

Indikator penilaian RB Tematik pada pemerintah daerah terdiri dari komponen penilaian rencana aksi RB Tematik serta capaian indikator dampak RB Tematik pemerintah daerah.

2.1 Penilaian Rencana Aksi RB Tematik Pemerintah Daerah

	Filter	Kriteria	Penjelasan
I	Rencana Aksi		
	Input Rencana Aksi RB Tematik pada Portal RB Nasional Serta Keabsahan dari Rencana Aksi	a. Kualitas Sasaran Keberhasilan RB	
		Kesesuaian Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila sasaran telah berorientasi hasil/ <i>outcome</i> .
		Kesesuaian Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan <i>Road Map</i> RB Nasional.
		Perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup	Dapat diklaim apabila indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran RB Tematik.
		b. Kualitas Rencana Aksi	
		Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah.
	Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	Dapat diklaim apabila rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	

Filter		Kriteria	Penjelasan
		Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	Dapat diklaim apabila rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan/atau <i>stakeholder</i> eksternal di luar pemerintahan.
II Capaian Output			
	Input Capaian Rencana Aksi pada Portal RB Nasional	Capaian Rencana Aksi	Jumlah rencana aksi yang terlaksana dibandingkan dengan rencana aksi yang direncanakan sampai dengan Triwulan III.
III Capaian Dampak			
	Memilih tema, input sasaran dan indikator, input rencana aksi, dan input capaian rencana aksi pada Portal RB Nasional	Capaian Dampak RB Tematik	Skor perhitungan capaian dampak RB Tematik.

2.2 Penilaian Capaian Indikator Dampak RB Tematik Pemerintah Daerah

A. Pengentasan Kemiskinan

Perhitungan capaian indikator dampak pada tema pengentasan kemiskinan dilihat berdasarkan tiga aspek penilaian, yaitu:

1. tingkat kemiskinan tahun berjalan;
2. tingkat kemiskinan ekstrem tahun berjalan; dan
3. delta kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.

Setiap aspek penilaian dibagi ke dalam beberapa kondisi dengan bobot penilaian yang berbeda, sebagaimana diilustrasikan pada tabel di bawah ini. Adapun perhitungan tingkat kemiskinan ekstrem tahun berjalan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	KONDISI I	KONDISI II	KONDISI III
Tingkat kemiskinan (Tahun berjalan)	0,5 - 1,5	< 7%	7 - 9%*	> 9%*
		1,5	1	0,5

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	KONDISI I	KONDISI II	KONDISI III
Tingkat kemiskinan ekstrem (Tahun berjalan)**	0-0,5	< 0,6%	0,6 - 1,2%	> 1,2%
		0,5	0,25	0
Delta Kemiskinan	1-2,5***	Kondisi menurun	Kondisi menurun	Kondisi menurun
		1-2,5 ***		
		Kondisi meningkat	Kondisi meningkat	Kondisi meningkat
		0		

*Rata-rata angka kemiskinan nasional

**Jika tersedia data kemiskinan ekstrem

*** Selisih antara total bobot (3) dengan bobot yang sudah diperoleh dari aspek penilaian tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem

Pengukuran delta kemiskinan dilakukan dengan melihat persentase penurunan kemiskinan pada pemerintah daerah A dibagi persentase penurunan kemiskinan tertinggi pemerintah daerah pada masing-masing kondisi. Lebih jelas ditampilkan pada gambar berikut.

$$\text{Delta Kemiskinan Pemda A} = \frac{(X \text{ Tahun}(n-1) - X \text{ tahun } n) A}{\Delta X_{\max B}} \times (3)$$

Keterangan:

X = Persentase penduduk miskin

ΔX = (X tahun n-1 – Xtahun n)

n = Tahun yang diukur

A = Pemerintah daerah yang sedang diukur

B = Kondisi

Max = Nilai tertinggi

Khusus Pemerintah Provinsi, bobot penilaian yang diperoleh akan dikali dengan skor pengali, sesuai dengan kondisi penurunan tingkat kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENURUN TINGKAT KEMISKINANNYA	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, diketahui Provinsi ABC memiliki tingkat kemiskinan sebesar 6,3% pada tahun 2021 dan 4,0%, serta tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,42% pada tahun 2022.

Diketahui juga bahwa Provinsi ABC mengalami penurunan terbesar kedua untuk kategori Provinsi pada kondisi I (kemiskinan < 7% yakni penurunan sebesar 2,3%). Penurunan kemiskinan tertinggi pada kondisi I adalah Provinsi JKL dengan persentase penurunannya sebesar 2,5% (dari 6,7% tahun 2021 menjadi 4,2% tahun 2022). Selanjutnya, dari 9 kabupaten/kota pada Provinsi ABC diketahui 7 kabupaten/kota mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Berikut adalah cara pengukuran RB Tematik Kemiskinan Provinsi ABC.

1) (Tingkat Kemiskinan)

Provinsi ABC telah melewati target kemiskinan nasional yakni 7% pada tahun 2024, sehingga Provinsi ABC masuk kedalam Kondisi I dan memperoleh nilai 1,5 poin.

2) (Tingkat Kemiskinan Ekstrem)

Tingkat Kemiskinan Ekstrem pada Provinsi ABC telah berhasil ditekan menjadi 0,42% dan berada di bawah target ideal yaitu 0,6%, sehingga Provinsi ABC masuk ke dalam Kondisi I dan memperoleh nilai 0,5 poin.

3) (Delta Kemiskinan)

Provinsi ABC adalah provinsi dengan persentase penurunan kemiskinan kedua terbesar pada Kondisi I, maka untuk memperoleh nilai delta kemiskinan dilakukan perhitungan dengan membagi persentase penurunan kemiskinan Provinsi ABC dengan persentase penurunan kemiskinan tertinggi pada Kondisi I yakni Provinsi JKL. Sehingga perhitungan nilai delta kemiskinan Provinsi ABC adalah sebagai berikut: $2,3\%/2,5\% \times 1$ poin (sisa bobot tematik), yang menghasilkan delta kemiskinan Provinsi ABC adalah 0,92 poin.

Total nilai RB Tematik Provinsi ABC (sebelum Skor Pengali) sebesar 2,92 ($1,5 + 0,5 + 0,92$).

4) (Skor Pengali ketentuan khusus Provinsi)

Diketahui bahwa pada Provinsi ABC terdapat 7 dari 9 kabupaten/kota mengalami penurunan kemiskinan atau sekitar 77% (masuk Kondisi II), sehingga skor pengali untuk Provinsi ABC adalah 75%.

Maka, total nilai RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Provinsi ABC adalah $2,92 \times 75\% = 2,19$ Poin.

B. Peningkatan Investasi

B.1 Pemerintah Provinsi

Perhitungan capaian dampak realisasi investasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dilihat pada dua aspek penilaian, yaitu peningkatan realisasi investasi dan capaian target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

ASPEK PENILAIAN	BOBOT MAKSIMAL
Peningkatan Realisasi Investasi	1,5

Capaian Target	1,5
----------------	-----

$$\text{Peningkatan Realisasi Investasi} = \frac{(\text{X Tahun (n)} - \text{X tahun (n-1)})}{\text{X Tahun (n-1)}} \times 1,5$$

Keterangan:

X Tahun (n) = Realisasi Investasi Tahun Berjalan

X Tahun (n-1) = Realisasi Investasi Tahun Lalu

Selanjutnya, bobot penilaian yang diperoleh akan dikali dengan skor pengali, sesuai dengan kondisi peningkatan realisasi investasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENINGKAT REALISASI INVESTASINYA	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM didapatkan bahwa realisasi investasi pada Provinsi ABC tahun 2023 sebesar Rp. 850 Miliar sedangkan pada tahun 2022 tingkat realisasi investasi pada Provinsi ABC sebesar Rp. 800 Miliar. Selain itu diperoleh data bahwa capaian atas target realisasi investasi pada Provinsi ABC mencapai 70%. Informasi lain yang didapatkan juga bahwa 92% kabupaten/kota yang berada di bawah Provinsi ABC mengalami kenaikan realisasi investasi. Maka perhitungan skor tematik yang diperoleh Provinsi ABC sebagai berikut:

1) (Peningkatan Realisasi Investasi)

Realisasi investasi pada Provinsi ABC pada tahun 2023 mencapai Rp. 850 Miliar, angka tersebut meningkat dari tahun 2022 yang semula sebesar Rp. 800 Miliar, sehingga perhitungan atas peningkatan realisasi investasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{(850 - 800)}{800} \times 1,5 = 0,09$$

2) (Capaian Target)

Berdasarkan target yang sudah ditetapkan capaian target realisasi investasi pada Provinsi ABC sebesar 70% maka perhitungan untuk aspek penilaian capaian target adalah $70\% \times 1,5 = 1,05$

Sehingga total bobot dari kedua aspek penilaian pada Provinsi ABC didapatkan sebesar 1,14.

3) (Skor Pengali ketentuan khusus Provinsi)

Selanjutnya bobot penilaian tersebut perlu dihitung dengan skor pengali. Berdasarkan informasi, sebesar 92% kabupaten/kota pada Provinsi ABC mengalami peningkatan (masuk Kondisi I),

sehingga skor pengali untuk Provinsi ABC didapatkan sebesar 100%.

Sehingga total skor RB Tematik Peningkatan Investasi akhir yang diperoleh Provinsi ABC adalah sebesar **1,14** (100% x 1,14).

B.2 Pemerintah Kabupaten/Kota

Perhitungan capaian dampak realisasi investasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dilihat berdasarkan dua aspek penilaian, yaitu realisasi investasi tahun berjalan dan peningkatan realisasi investasi. Perhitungan ini akan diklasifikasikan sesuai dengan kondisi realisasi investasinya pada tahun berjalan. Pengklasifikasian dilakukan dengan membagi ke dalam tiga kluster dengan metode statistika (pembagian kuartil; membagi data menjadi empat bagian yang akan memperoleh tiga nilai kuartil: Q1 = Kategori Tinggi, Q2 = Kategori Sedang, dan Q3 = Kategori Rendah). Sedangkan pada perhitungan aspek peningkatan realisasi investasi, akan dibandingkan dengan peningkatan realisasi investasi secara nasional pada masing-masing kelasnya.

ASPEK PENILAIAN		BOBOT MAKSIMAL (Berdasarkan Realisasi Investasi)		
		Kategori Tinggi	Kategori Sedang	Kategori Rendah
1.	Realisasi Investasi Tahun Berjalan	2	1,5	1
2.	Peningkatan Realisasi Investasi	1	1,5	2

Rumus Perhitungan Peningkatan Realisasi Investasi =

$$\frac{(X \text{ Tahun } (n)A - X \text{ Tahun } (n-1)A)}{\Delta X_{\max C}} \times \text{Bobot Maksimal Kategori}$$

Keterangan:

X = Nilai realisasi investasi (PMA + PMDN)

$\Delta X = (X_{\text{tahun } n-1} - X_{\text{tahun } n})$

n = Tahun yang dihitung

A = Pemerintah daerah yang sedang diukur

$\Delta X_{\max C}$ = Peningkatan Realisasi Investasi Terbesar pada masing-masing kluster

Ilustrasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Pemerintah Kabupaten XYZ pada tahun 2023 sebesar Rp. 20 Triliun, sedangkan untuk realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 18 Triliun. Nilai tematik yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten XYZ adalah sebagai berikut.

1) (Realisasi Investasi Tahun Berjalan)

Realisasi investasi 2023 pada Kabupaten XYZ mencapai Rp. 20 Triliun angka tersebut diasumsikan masuk kategori sedang, sehingga Pemerintah Kabupaten XYZ memperoleh skor sebesar 1,5 pada aspek penilaian Realisasi Investasi Tahun Berjalan.

2) (Peningkatan Realisasi Investasi)

Peningkatan realisasi investasi Kabupaten XYZ adalah sebesar Rp. 2 Triliun, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan asumsi peningkatan realisasi investasi tertinggi secara nasional pada kategori sedang adalah sebesar Rp. 6 Triliun, maka skor penilaian pada aspek peningkatan realisasi investasi pada Kabupaten XYZ adalah sebesar 0,5 ($2/6 \times 1,5$).

Sehingga total skor RB Tematik Peningkatan Investasi yang didapatkan oleh Kabupaten XYZ sebesar **2,00** ($1,5 + 0,5$).

C. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)

Perhitungan capaian dampak pada tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang berfokus pada penurunan stunting memiliki dua aspek penilaian, yaitu tingkat stunting tahun berjalan dan delta tingkat stunting tahun berjalan. Perolehan bobot dari aspek penilaian tersebut juga akan bergantung pada beberapa kondisi prasyarat sebagai skor pengali dari bobot yang diperoleh pada setiap aspek penilaian.

ASPEK PENILAIAN		KONDISI	BOBOT
1.	Tingkat Stunting (Tahun Berjalan)	< 14%	1,5
		> 14%	0,75
2.	Delta Tingkat <i>Stunting</i>	Menurun $\geq 3,8\%$	1,5
		Menurun < 3,8%	< 1,5
		Meningkat	0

Perolehan bobot pada tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dengan fokus penurunan stunting akan bergantung pada beberapa kondisi prasyarat. Kondisi prasyarat tersebut akan menjadi skor pengali dari bobot yang telah diperoleh sebelumnya.

KONDISI PRASYARAT	PENJELASAN	SKOR PENGALI
Kondisi Prasyarat I	1. Rencana Aksi Terkait Digitalisasi 2. Indeks SPBE Minimal Baik ($\geq 2,6$)	100%
Kondisi Prasyarat II	1. Rencana Aksi Terkait Digitalisasi 2. Indeks SPBE ($< 2,6$)	75%
Kondisi Prasyarat III	Tidak Ada Rencana Aksi Terkait Digitalisasi	50%

Selanjutnya, khusus bagi Pemerintah Provinsi, bobot penilaian di atas akan dikalikan kembali dengan skor pengali lainnya berdasarkan kondisi penurunan tingkat stunting pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENGALAMI PENURUNAN TINGKAT STUNTING	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

(Contoh Kasus Pemerintah Provinsi)

Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan bahwa tingkat stunting pada Provinsi ABC pada tahun 2023 sebesar 16%, dan sebesar 18% pada tahun 2022. Selain itu didapatkan data bahwa pada Provinsi ABC persentase kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat stunting mencapai 80%. Kondisi Indeks SPBE Provinsi ABC adalah sebesar 2,5 serta rencana aksi tematik yang dibangun sudah terdapat keterkaitan dengan digitalisasi. Diketahui juga bahwa penurunan stunting tertinggi pada Kondisi I (angka stunting > 14%) adalah Pemerintah Daerah XYZ dengan delta sebesar 3,8%. Maka perhitungan skor RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Provinsi ABC sebagai berikut.

1) (Tingkat Stunting Tahun Berjalan)

Pada Provinsi ABC didapatkan kondisi bahwa tingkat stunting pada tahun berjalan mencapai 16%, yang mana angka tersebut di atas target nasional 14%. Maka skor yang diperoleh untuk aspek penilaian tingkat stunting tahun berjalan sebesar 0,75.

2) (Delta Tingkat Stunting)

Pada tahun 2022 tingkat stunting pada Provinsi ABC mencapai 18% kemudian pada 2023 menurun menjadi 16%. Sehingga untuk delta penurunan tingkat stunting pada Provinsi ABC sebesar 2%, maka skor yang diperoleh untuk aspek delta stunting sebesar $2/3,8 \times 1,5 = 0,78$.

Maka skor penilaian atas kedua aspek penilaian untuk Provinsi ABC adalah $0,75 + 0,78 = 1,53$.

3) (Kondisi Prasyarat)

Selain itu kondisi prasyarat yang diperoleh dari Provinsi ABC adalah Indeks SPBE sebesar 2,5 dan sudah terdapat rencana aksi terkait digitalisasi maka Provinsi ABC memenuhi Kondisi Prasyarat II sehingga skor penilaian setelah penyesuaian kondisi prasyarat sebesar $1,53 \times 75\% = 1,14$.

4) (Skor Pengali Ketentuan Khusus Provinsi)

Selanjutnya, khusus untuk provinsi, terdapat penyesuaian lain yaitu tingkat persentase kabupaten/kota yang tingkat stuntingnya menurun. Berdasarkan data yang diperoleh Provinsi ABC mencapai 80% untuk persentase kabupaten/kota dengan tingkat stunting menurun, sehingga Provinsi ABC berada pada posisi Kondisi 2.

Sehingga skor RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang didapatkan oleh Provinsi ABC adalah sebesar $75\% \times 1,14 = 0,855$.

(Contoh Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota)

Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan bahwa tingkat stunting pada Kabupaten XYZ pada tahun 2023 sebesar 13%, dan sebesar 13,5% pada tahun 2022. Data lain yang diperoleh dari Kabupaten XYZ didapatkan bahwa Indeks SPBE sebesar 3,0 serta rencana aksi tematik yang dibangun sudah terdapat keterkaitan dengan digitalisasi. Maka perhitungan skor tematik untuk Provinsi ABC sebagai berikut.

1) (Tingkat Stunting Tahun Berjalan)

Pada Kabupaten XYZ tingkat stunting tahun berjalan berada pada posisi 13%, kondisi tersebut berada dibawah target nasional yaitu 14%. Maka skor penilaian untuk aspek tingkat stunting tahun berjalan sebesar 1,5.

2) (Delta Tingkat Stunting)

Dari data yang diperoleh, Kabupaten XYZ mengalami penurunan tingkat stunting sebesar 0,5%, yang semula 13,5% pada 2022 menjadi 13% pada 2023. Maka skor penilaian untuk aspek delta stunting sebesar $0,5/3,8 \times 1,5 = 0,19$.

Maka bobot penilaian atas kedua aspek penilaian untuk provinsi ABC sebesar $1,5 + 0,19 = 1,69$.

3) (Kondisi Prasyarat)

Selain itu kondisi prasyarat yang diperoleh dari Kabupaten XYZ adalah Indeks SPBE sebesar 3 dan sudah terdapat rencana aksi terkait digitalisasi maka Kabupaten XYZ memenuhi Kondisi Prasyarat II.

Sehingga skor RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Kabupaten XYZ setelah penyesuaian Kondisi Prasyarat adalah $1,69 \times 75\% = 1,26$.

D. Pengendalian Inflasi

Untuk perhitungan RB Tematik dengan tema Pengendalian Inflasi, akan menggunakan data ranking inflasi yang merupakan komponen penilaian dalam Indeks Kinerja Pengendalian Inflasi Pangan Daerah (IKPIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun ranking inflasi adalah Indeks Harga Konsumsi (IHK) dan Indeks Perkembangan Harga

(IPH) yang telah dinormalisasi terhadap data pangan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah diolah oleh BPS. Berikut bobot dan cara pengukuran RB Tematik Pengendalian Inflasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Aspek Penilaian	Bobot Maksimal
Ranking Inflasi	3
Cara Pengukuran	
$\text{Nilai RB Tematik Inflasi} = \frac{\text{Ranking Inflasi IKPIPD}}{50 * } \times 3$	

*)Bobot ranking inflasi dalam IKPIPD

Ilustrasi

Berdasarkan data IKPIPD oleh Kemendagri, diperoleh ranking inflasi Kabupaten XYZ adalah 38, maka nilai RB Tematik inflasinya adalah $38/50 \times 3$ (bobot tematik) = **2,28** poin.

Selanjutnya, khusus bagi Pemerintah Provinsi, bobot penilaian di atas akan dikalikan kembali dengan skor pengali lainnya berdasarkan **kondisi IKPIPD** pada pemerintah kabupaten/kota di bawahnya, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG IKPIPD MINIMAL PADA PERSEPSI “SESUAI ATAU ≥ 65 NILAI IKPIPD”	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

Berdasarkan data IKPIPD oleh Kemendagri, diperoleh ranking inflasi Pemerintah Provinsi ABC adalah 42 dan dari total 38 kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan diketahui 26 kabupaten/kota (68,42%) memiliki nilai IKPIPD minimal pada persepsi “sesuai” (≥ 65) atau dengan kata lain skor pengali untuk Provinsi ABC adalah 50% (Kondisi III, Rentang < 75%). Dengan demikian, nilai RB Tematik Pengendalian Inflasi Provinsi ABC adalah $42/50 \times 3$ (bobot tematik) = 2,52 poin x skor pengali (50%) = **1,26** poin.

E. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam perhitungan capaian dampak RB Tematik penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada dasarnya akan melihat realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun berjalan yang datanya bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun sebelum masuk pada perhitungan realisasi tersebut, pemerintah daerah perlu memenuhi kondisi awal untuk memperoleh bobot penilaian sebagaimana pada tabel berikut.

FILTER	TARGET
(% Rencana PDN)	Minimal 40%

Selanjutnya, capaian dampak RB Tematik PDN pada Pemerintah Daerah akan diukur dengan melihat persentase realisasi PDN, yang membandingkan antara realisasi pengadaan yang merupakan PDN dengan Realisasi keseluruhan melalui penyedia kemudian akan dikali dengan bobot tematik. Untuk mendorong aspek keadilan, pengukuran dilakukan dengan memberikan perbedaan pembobotan memperhatikan kontribusi terhadap penggunaan PDN, hal ini dilihat dari besaran realisasi penyedia Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

ASPEK PENILAIAN	KONDISI I	KONDISI II
Realisasi Penyedia	≥ Rp. 500 Miliar	< Rp. 500 Miliar
	2	1
Persentase Realisasi PDN	1	2

Selanjutnya bobot penilaian yang didapatkan akan dikalikan dengan skor pengali, sesuai dengan kondisi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKPBj) pada instansi pemerintah serta tingkat capaian target PDN, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.

Skor ITKP	PENJELASAN	SKOR	NILAI
	CAPAIAN TARGET PDN	PENGALI	MAKSIMAL
1. ITKP Baik	> 90% - 100%	100%	3
	75% - 90%	75%	2,25
	< 75%	50%	1,5
2. ITKP Cukup	> 90% - 100%	75%	2,25
	75% - 90%	50%	1,5
	< 75%	25%	0,75
3. ITKP Kurang	> 90% - 100%	50%	1,5
	75% - 90%	25%	0,75
	< 75%	0	0

Ilustrasi

Berdasarkan data Capaian PDN oleh LKPP, diketahui Pemerintah Daerah ABC memiliki data sebagai berikut:

NO	Data Pemerintah Daerah ABC	Nilai
1.	RUP Penyedia	Rp303.786.004.332
2.	RUP PDN	Rp303.770.846.332
3.	Realisasi Penyedia	Rp184.255.211.971
4.	Realisasi PDN	Rp178.417.984.183
5.	% Rencana PDN (2/1)	99,9%
6.	% Realisasi PDN (4/3)	96,8%
7.	% Capaian Target PDN (4/2)	58,7%
8.	Skor ITKP	Baik

Perhitungan RB Tematik Pemerintah daerah ABC sebagai berikut:

1) (Filter)

Pemerintah Daerah ABC telah memenuhi filter/persyaratan dasar yakni RUP PDN minimal 40% (nomor 5 pada tabel di atas).

2) (Aspek Penilaian)

Selanjutnya, untuk pemberian bobot RB Tematik Penggunaan PDN, karena Pemerintah Daerah ABC memiliki realisasi penyedia < Rp. 500 Miliar maka berlaku Kondisi II yakni bobot awal 1 poin dan bobot realisasi PDN adalah 2 poin. Nilai RB Tematik Pemerintah Daerah ABC adalah persentase realisasi PDN (nomor 6) yakni 96,8% dikali bobot tematik 2 poin sehingga diperoleh 1,936 poin, angka tersebut ditambahkan 1 bobot awal sehingga diperoleh poin sebesar 2,936.

3) (Skor Pengali)

Nilai tersebut akan dikalikan dengan skor pengali 50% (karena Pemerintah Daerah ABC memiliki Skor ITKP Baik namun % Capaian target PDN (nomor 7) kurang dari 75%.

Sehingga skor RB Tematik Penggunaan PDN Pemerintah Daerah ABC adalah **1,47 poin**.

V. Koefisien Penilaian

Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.

NO	KOEFISIEN	PENJELASAN	KRITERIA	GRADING KOEFISIEN
1	Terdapat kejadian KKN	Segala jenis praktik KKN, baik di unit kerja maupun instansi	Melibatkan pimpinan instansi dan birokrasi (bersifat sistematis)	-5% dan tidak dapat naik predikat pada tahun berjalan

NO KOEFISIEN	PENJELASAN	KRITERIA	GRADING KOEFISIEN
	<p>pemerintah, yang dilakukan oleh pegawai, baik staf maupun pimpinan, dan telah memiliki putusan pengadilan.</p>	Melibatkan beberapa orang yang memiliki posisi/jabatan tinggi dalam birokrasi	-4%
		Melibatkan pimpinan instansi saja	-3%
		Terjadi di satu unit kerja (melibatkan pimpinan unit kerja beserta pegawai)	-2,5%
		Melibatkan pegawai (oknum) saja baik di pusat maupun unit kerja	-2%
2	<p>Pemberitaan negatif yang dimaksud merupakan pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja dan/atau pelayanan serta sudah ada respon dari pejabat di atasnya, dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak memiliki konsekuensi hukum • memiliki konsekuensi hukum, namun belum berkekuatan hukum tetap 	Menjadi atensi khusus Presiden	-3%
		Menjadi perhatian secara intens di media sosial/media massa	-2%
3	<p>Tingkat kualitas implementasi kebijakan meso</p> <p>Kualitas implementasi kebijakan meso dilihat dari persentase instansi pemerintah yang telah memiliki nilai "Baik" pada suatu indikator tertentu.</p>	<p>Kondisi prasyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dilakukan secara populasi 2. Telah menginput hasil penilaian melalui Portal RB Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • +2%, bagi indikator yang masuk dalam RPJMN dan telah memenuhi target RPJMN • +1%, jika tidak masuk dalam RPJMN namun

NO KOEFISIEN	PENJELASAN	KRITERIA	GRADING KOEFISIEN
			memenuhi target di atas 60% <ul style="list-style-type: none"> • -1%, jika target masih < 25%

MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 739 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
 REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

PELAPORAN EVALUASI EKSTERNAL OLEH EVALUATOR MESO

Dalam pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2023, kementerian/lembaga yang termasuk dalam Evaluator Meso perlu melakukan input melalui Sistem Informasi RB Nasional atau Portal RB Nasional. Muatan yang perlu dilaporkan kepada Instansi Pemerintah melalui Portal RB Nasional setidaknya mencakup beberapa hal berikut:

INFORMASI	PENJELASAN
Hasil Penilaian	Evaluator Meso menyampaikan hasil penilaian implementasi kebijakan meso pada Portal RB Nasional.
Catatan	Evaluator Meso memberikan catatan atas hasil penilaian implementasi kebijakan meso pada Portal RB Nasional. Catatan tersebut setidaknya memuat hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran interpretasi hasil penilaian yang telah dilakukan; 2. Upaya yang telah dilakukan, kendala, dan/atau kunci keberhasilan apabila terjadi peningkatan atau kendala ketika terjadi penurunan yang signifikan; dan 3. Informasi terkait komponen penilaian yang masih rendah apabila dibandingkan dengan komponen lainnya, atau komponen yang menurun nilainya. Informasi ini paling tidak memuat 1-3 komponen yang perlu menjadi perhatian instansi pemerintah yang dinilai.
Rekomendasi	Evaluator Meso memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil penilaian implementasi kebijakan meso pada Portal RB Nasional. Rekomendasi yang diberikan setidaknya memuat dua hal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan perbaikan yang dapat memberikan solusi apabila terdapat kendala atau permasalahan yang termuat pada poin 2 pada "Catatan"; dan 2. Rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pada komponen penilaian yang dianggap masih kurang.

Informasi yang disampaikan ke dalam Portal RB Nasional adalah informasi yang bersifat final, Sehingga seluruh informasi dari Evaluator Meso yang termuat dalam Portal RB Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Evaluator Meso selaku pengampu data. Apabila terdapat perbedaan data, anomali data, atau terdapat hal-hal lain yang menimbulkan bias informasi, Evaluator Nasional akan melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan Evaluator Meso.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 739 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

KELENGKAPAN EVALUASI INTERNAL

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) perlu melakukan input melalui sistem informasi RB nasional atau Portal RB Nasional untuk dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023. Informasi yang harus diinput, antara lain:

1. Rencana aksi; dan
2. Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI).

Rencana aksi yang diinput adalah rencana aksi RB General dan rencana aksi RB Tematik sesuai dengan tema yang dipilih untuk tahun 2023. Contoh format rencana aksi dapat dilihat melalui Modul Pembangunan RB Mikro.

LHEI adalah laporan yang berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal K/L/D, khususnya pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan pelaksanaan atas rencana aksi RB (*on-going*). Pelaporan hasil evaluasi internal tahun 2023 disampaikan melalui Portal RB Nasional. Adapun format LHEI yang dapat digunakan oleh K/L/D adalah sebagai berikut.

Format LHEI

Nomor : (nomor surat) (tanggal bulan tahun)

Hal : Hasil Evaluasi Internal RB Tahun 20XX

**Yth. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
di
tempat**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Evaluatur Internal (*nama instansi pemerintah*) telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB (RB) di (*nama instansi pemerintah*).

Tujuan evaluasi untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di (*nama instansi pemerintah*), memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan (*nama instansi pemerintah*).

Evaluasi internal dilakukan melalui ... (*penjelasan secara ringkas gambaran umum mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana tahapan/strategi/pola/metode evaluasi dilakukan*).

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi internal RB di lingkungan Nama K/L/D adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum pelaksanaan RB K/L/D
berisi tentang capaian positif dan capaian yang masih memerlukan peningkatan (area of improvement), terkait dengan capaian indikator sasaran RB dan capaian indikator kegiatan utama.
2. Catatan
 - a. *atas perencanaan RB baik di level instansi maupun di level unit kerja dapat berisi hal-hal berikut:*
 - i. *informasi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi RB tahun sebelumnya*
 - ii. *catatan atas kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi RB K/L/D (mengacu pada kriteria penilaian TPN atas kualitas dokumen perencanaan RB)*
 - b. *atas pelaksanaan Rencana Aksi RB, berisi tentang ketercapaian target-target Rencana Aksi (output dan waktu), kualitas kegiatan terhadap*

ekspektasi Rencana Aksi RB, dan kualitas manajemen dalam pelaksanaan RB.

3. Rekomendasi

- a. *berisi rekomendasi perbaikan konkret untuk ditindaklanjuti oleh K/L/D berdasarkan catatan atas kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi RB K/L/D*
- b. *berisi rekomendasi perbaikan konkret untuk ditindaklanjuti oleh K/L/D berdasarkan atas catatan pelaksanaan Rencana Aksi RB K/L/D*

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan *(nama instansi pemerintah)*.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Pimpinan Instansi, kami ucapkan terima kasih.

**Penanggung Jawab Evaluator
Internal K/L/D,**

(Jabatan)

(Nama)

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS